



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat laporan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang meliputi dari target dan realisasinya serta kebijakan keuangan daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan daerah tahun bersangkutan yang terukur secara rasional untuk dicapai dari setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada memiliki posisi yang sangat penting bagi kesinambungan hidup dan kemandirian suatu daerah, mengingat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di suatu daerah diperoleh dari hasil pengelolaan sumber pendapatan daerah.

Sesuai dengan kondisi faktual yang ada, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mempunyai ketergantungan pada pendapatan daerah yang bersumber dari luar Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti dana perimbangan baik Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang kecil dalam pembiayaan daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat.

Meskipun begitu, secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2013 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan.



A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Langkah–langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah;

- 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Retribusi Daerah yang telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009;
- 2) Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, tidak dilakukan dengan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditempuh melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Terus berupaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 4) Mendorong investasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah;
- 5) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah;
- 6) Meningkatkan pemanfaatan aset daerah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

b. Dana Perimbangan;

Penetapan pagu dana perimbangan ditetapkan berdasarkan alokasi definitif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk adanya peningkatan setiap tahun, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPB).



c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

- 1) Pendapatan dari Bagi hasil Pajak Provinsi sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- 2) Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan dana transfer bagi hasil pajak provinsi (PKB, BBNKB, PBB-KB dan air bawah tanah).
- 3) Berkoordinasi dengan pihak ketiga berkaitan dengan hibah pihak ketiga seperti Petrochina Internasional Jabung LTD.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Total realisasi pendapatan daerah selama tahun 2013 melebihi penerimaan yang ditargetkan atau sebesar 104,19 %. Over target pendapatan daerah pada tahun ini disumbang oleh semua sumber-sumber pendapatan : Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 110,61 % dari target, Dana Perimbangan terealisasi sebesar 103,84 % dari target, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 105,45 % dari target. Hal yang perlu mendapat apresiasi dari uraian dan tabel 3.1. adalah Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan terbesar dibanding dua sumber pendapatan lainnya.

Apabila dibanding dengan total realisasi pendapatan daerah tahun 2012, total realisasi pendapatan daerah tahun 2013 mengalami peningkatan atau terealisasi sebesar 113,62 %.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012–2013

NO	PENDAPATAN	2012	2013*	+/- (%)
1	Pendapatan Asli Daerah			
	Target	23.951.374.930,80	27.697.198.667,83	115,64
	Realisasi	29.435.684.059,85	30.636.616.753,46	104,08
	Lebih (Kurang)	5.484.309.129,05	2.939.418.085,63	53,60
	Realisasi (%)	122,90	110,61	
2	Dana Perimbangan			
	Target	651.189.908.152,00	779.501.879.845,90	119,70
	Realisasi	718.684.301.091,00	809.458.361.816,00	112,63
	Lebih (Kurang)	67.494.392.939,00	29.956.481.970,10	44,38
	Realisasi (%)	110,36	103,84	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
	Target	61.666.574.679,00	75.821.072.151,85	122,95
	Realisasi	61.659.886.151,09	79.955.866.881,85	129,67
	Lebih (Kurang)	(6.688.527,91)	4.134.794.730,00	(61.819)
	Realisasi (%)	99,99	105,45	



Jumlah Pendapatan Daerah				
<i>Target</i>		736.807.857.761,80	883.020.150.665,58	119,84
<i>Realisasi</i>		809.779.871.301,94	920.050.845.451,31	113,62
Lebih (Kurang)		72.972.013.540,14	37.030.694.785,73	50,75
<i>Realisasi (%)</i>		109,90	104,19	

* Data Sementara (unaudit)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah

a. Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Penerimaan dari jenis lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.

Tabel 3.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012–2013

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2012	2013*	+/- (%)
1	Pajak			
	Target	2.280.125.000,00	5.426.500.000,00	237,99
	Realisasi	6.183.757.883,00	8.399.170.234,00	135,83
	Lebih (Kurang)	3.903.632.883,00	2.972.670.234,00	76,15
	Realisasi (%)	271,20	154,78	
2	Retribusi			
	Target	2.339.250.000,00	3.751.105.400,00	160,36
	Realisasi	2.976.589.925,32	3.234.577.186,17	108,67
	Lebih (Kurang)	637.339.925,32	(516.528.213,83)	(81,04)
	Realisasi (%)	127,25	86,23	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	Target	6.106.000.000,00	4.498.606.053,06	73,68
	Realisasi	4.991.831.563,46	4.460.373.993,06	89,35
	Lebih (Kurang)	(1.114.168.436,54)	(38.232.060,00)	3,43
	Realisasi (%)	81,75	99,15	
4	Lain-Lain PAD			
	Target	13.225.999.930,80	14.020.987.214,77	106,01
	Realisasi	15.283.504.688,07	14.542.495.340,23	95,15
	Lebih (Kurang)	2.057.504.757,27	521.508.125,46	25,35
	Realisasi (%)	115,56	103,72	



	Jumlah Pendapatan Asli Daerah			
	Target	23.951.374.930,80	27.697.198.667,83	115,64
	Realisasi	29.435.684.059,85	30.636.616.753,46	104,08
	Lebih (Kurang)	5.484.309.129,05	2.939.418.085,63	53,60
	Realisasi (%)	122,90	110,61	

* Data Sementara (unaudit)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah

Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013 melebihi penerimaan yang ditargetkan. Over target Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini disumbang oleh semua sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah kecuali dari retribusi (retribusi jasa usaha sebesar 75,58 % dan retribusi perizinan tertentu sebesar 42,05 %) dan hasil pengelolaan kekayaan (bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN/PT. Telkom sebesar 33,95 % dan penerimaan jasa giro sebesar 73,29 %). Realisasi terbesar terjadi pada pajak daerah yaitu sebesar 154,78%, kemudian dari lain-lain PAD sebesar 103,72 %. Kenaikan realisasi pajak daerah secara signifikan ini dipengaruhi oleh berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, khususnya dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 2.463,35 %.

Apabila dibanding dengan total realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012, total realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 104,08 %. Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 29.435.684.059,85 dan pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 30.636.616.753,46.

b. Pendapatan Dana Perimbangan

Untuk dana perimbangan terdiri atas penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 3.3
Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2012–2013

NO	DANA PERIMBANGAN	2012	2013*	+/- (%)
1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak			
	Target	276.397.205.152,00	341.049.327.845,90	123,39
	Realisasi	343.891.598.091,00	371.005.809.816,00	107,88
	Lebih (Kurang)	67.494.392.939,00	29.956.481.970,10	44,38
	Realisasi (%)	124,42	108,78	
2	Dana Alokasi Umum			



	Target	356.323.443.000,00	430.383.112.000,00	120,78
	Realisasi	356.323.443.000,00	430.383.112.000,00	120,78
	Lebih (Kurang)	0,00	0,00	
	Realisasi (%)	100,00	100,00	
3	Dana Alokasi Khusus			
	Target	18.469.260.000,00	8.069.440.000,00	43,69
	Realisasi	18.469.260.000,00	8.069.440.000,00	43,69
	Lebih (Kurang)	0,00	0,00	
	Realisasi (%)	100,00	100,00	
	Jumlah Dana Perimbangan			
	Target	651.189.908.152,00	779.501.879.845,90	119,70
	Realisasi	718.684.301.091,00	809.458.361.816,00	112,63
	Lebih (Kurang)	67.494.392.939,00	29.956.481.970,10	44,38
	Realisasi (%)	110,36	103,84	94,09

* Data Sementara (unaudit)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah

Total realisasi dana perimbangan selama tahun 2013 melebihi penerimaan yang ditargetkan. Over target pendapatan daerah pada tahun ini disumbang oleh bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 108,78 %, sedangkan realisasi dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terealisasi sesuai target penerimaan yaitu 100 %.

Apabila dibanding dengan total realisasi dana perimbangan tahun 2012, total realisasi dana perimbangan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 112,63 %. Pada tahun 2012 Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 718.684.301.091,00 dan pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp. 809.458.361.816,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.



Tabel 3.4
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2012 – 2013

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2012	2013*	+/- (%)
1	Pendapatan Hibah			
	Target	0,00	0,00	
	Realisasi	0,00	0,00	
	Lebih (Kurang)	0,00	0,00	
	Realisasi (%)			
2	Dana Darurat			
	Target	0,00	0,00	
	Realisasi	0,00	0,00	
	Lebih (Kurang)	0,00	0,00	
	Realisasi (%)			
3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
	Target	19.191.363.347,00	20.629.706.274,00	107,49
	Realisasi	22.405.099.498,09	24.954.532.004,00	111,38
	Lebih (Kurang)	3.213.736.151,09	4.324.825.730,00	134,57
	Realisasi (%)	116,75	120,96	
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DPDF)			
	Target	34.372.878.000,00	44.492.530.000,00	129,44
	Realisasi	33.553.153.320,00	44.302.499.000,00	132,04
	Lebih (Kurang)	(819.724.680,00)	(190.031.000,00)	23,18
	Realisasi (%)	97,62	99,57	
5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	Target	8.102.333.332,00	10.698.835.877,85	132,05
	Realisasi	5.701.633.333,00	10.698.835.877,85	187,65
	Lebih (Kurang)	(2.400.699.999,00)	-	0,00
	Realisasi (%)	70,37	100,00	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
	Target	61.666.574.679,00	75.821.072.151,85	122,95
	Realisasi	61.659.886.151,09	79.955.866.881,85	129,67
	Lebih (Kurang)	(6.688.527,91)	4.134.794.730,00	(61.819,20)
	Realisasi (%)	99,99	105,45	105,46

* Data Sementara (unaudit)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012, data diolah

Total realisasi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama tahun 2013 sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 105,45 %. Realisasi terbesar pada pos dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya yaitu sebesar 120,96 %, sedangkan untuk pos Dana Penyesuaian dan



Otonomi Khusus (DPDF) dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi masing-masing sebesar 99,57 % dan 100 %.

Apabila dibanding dengan total realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2012, total realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 129,67 %. Pada tahun 2012 lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp. 61.659.886.151,09 dan pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp. 79.955.866.881,85.

d. Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Tabel 3.5
Perkembangan Pembiayaan Periode 2013*

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN/TARGET	REALISASI
1	Penerimaan Pembiayaan		
	- SILPA Tahun Lalu	122.574.932.005,14	122.574.932.005,14
	- Pencairan Dana Cadangan		
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	- Penerimaan Pinjaman Daerah		
	- Penerimaan Piutang Daerah		
2	Pengeluaran Pembiayaan		
	- Pembentukan Dana Cadangan		
	- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	11.250.000.000,00	11.250.000.000,00
	- Badan Usaha Kelompok/Anggota Masyarakat		
	- Pembayaran Pokok Utang		
	- Pemberian Pinjaman Daerah		
3	Pembiayaan Netto	111.324.932.005,14	111.324.932.005,14

* Data Sementara (unaudit)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah



Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2013, anggaran SILPA ditargetkan Rp. 122.574.932.005,14 dan terealisasi sebesar 100%. Sedangkan pada sisi realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 11.250.000.000,00 atau sebesar 100 % dari target pembentukan dana cadangan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Jika dilihat dari sisi maksimalisasi realisasi pendapatan, permasalahan penerimaan daerah terjadi pada pos-pos yang memerlukan koordinasi di tingkat pusat seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DPDF).

Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan mengenai rendahnya realisasi dari target yang telah ditentukan tersebut diantaranya :

- a. Pengawasan terhadap stakeholder penyumbang pendapatan.
- b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi.
- d. Maksimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah melalui pelaksanaan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran, dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.



2. Target dan Realisasi Belanja

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 3.6
APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2013

No	URAIAN	TAHUN 2012			ANGGARAN 2013		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	323.461.909.600,00	310.190.569.577,00	95,90	355.535.450.029,87	345.969.981.262,00	97,31
2	BELANJA LANGSUNG	539.230.878.000,00	520.873.354.637,00	96,60	638.809.632.640,85	596.004.495.626,00	93,30
	Jumlah	862.692.787.600,00	831.063.924.214,00	96,33	994.345.082.670,72	941.974.476.888,00	94,73

* Data Sementara(unaudit)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah

Target dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami kenaikan secara nominal rupiah antara tahun 2012 dengan tahun 2013. Namun secara persentase realisasi belanja mengalami penurunan.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota serta belanja tidak terduga. Tahun 2013 belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 355.535.450.029,87 dan terealisasi sebesar Rp 345.969.981.262,00 atau 97,31 % lebih rendah dari rencana anggaran (*unaudit*).

Belanja pegawai yang merupakan belanja gaji pegawai yang ditargetkan sebesar Rp. 313.691.749.589,87 pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 306.859.216.928,00 atau 97,82 % dari jumlah anggaran. Belanja hibah tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 5.891.503.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.679.969.160,00 atau 96,41 %. Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 5.141.223.604,00 terealisasi sebesar Rp. 3.831.000.000,00 atau 74,52 %

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan



Desa tahun 2013 sebesar Rp. 29.610.973.836,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.363.295.174,00 atau 99,16 %.

Anggaran belanja tidak terduga pada tahun 2013 disediakan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 236.500.000,00 atau 19,71 % Hal ini disebabkan penggunaan belanja ini dilakukan sangat selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2012-2013

No	URAIAN	TAHUN 2012			ANGGARAN 2013		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai (gaji/TKD)	290.546.747.600,00	278.935.118.798,00	96,00	313.691.749.589,87	306.859.216.928,00	97,82
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0	0	
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0	0	
4	Belanja Hibah	2.978.200.000,00	2.578.200.000,00	86,57	5.891.503.000,00	5.679.969.160,00	96,41
5	Belanja Bantuan Sosial	725.000.000,00	720.000.000,00	99,31	5.141.223.604,00	3.831.000.000,00	74,52
6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0	0	
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten dan Desa	27.930.762.000,00	27.636.971.029,00	98,95	29.610.973.836,00	29.363.295.174,00	99,16
8	Belanja tidak terduga	1.281.200.000,00	320.279.750,00	25,00	1.200.000.000,00	236.500.000,00	19,71
	JUMLAH	323.461.909.600,00	310.190.569.577,00	95,90	355.535.450.029,87	345.969.981.262,00	97,31

* Data sementara (un audit)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah.

b. Belanja Langsung

Komponen utama belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan dan tertuang dalam APBD yang ditetapkan setiap tahunnya.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012-2013

No	URAIAN	TAHUN 2012			ANGGARAN 2013		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	42.791.057.932,00	37.288.645.192,00	87,14	47.033.111.800,00	44.848.303.225,00	95,35
2	Belanja Barang dan Jasa	165.749.769.597,00	148.263.429.210,00	89,45	204.259.811.791,45	187.545.931.936,00	91,82
3	Belanja Modal	330.690.050.471,00	317.321.280.235,00	95,96	387.516.709.049,40	363.610.260.465,00	93,83
	Jumlah	539.230.878.000,00	502.873.354.637,00	93,26	638.809.632.640,85	596.004.495.626,00	93,30

* Data sementara (un audit)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah.



Tahun 2013 belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 638.809.632.640,85 dan terealisasi sebesar Rp 596.004.495.626,00 atau 93,30 % lebih rendah dari rencana anggaran (*unaudit*).

Untuk belanja pegawai dalam belanja langsung yang ditargetkan sebesar Rp. 47.033.111.800,00 terealisasi sebesar Rp. 44.848.303.225,00 atau 95,35 %, sedangkan untuk belanja barang dan jasa yang ditargetkan sebesar Rp. 204.259.811.791,45,00 terealisasi sebesar Rp. 187.545.931.936,00 atau 91,82 % dan untuk belanja modal yang ditargetkan Rp. 387.516.709.049,00 terealisasi sebesar Rp. 363.610.260.465,00 atau 93,83 %.